



BAKESBANGPOL
TABANAN



RENJA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL PAHLAWAN NO. 33 TABANAN-BALI
2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Perubahan Rencana Kerja ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 4 Juni 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran

Drs. I PUTU DIAN SETIAWAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197310261993021003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penyajian	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3 Program dan Kegiatan.....	24
3.4 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB V PENUTUP.....	50
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud apabila dalam pemerintahan telah terkandung beberapa unsur seperti transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Penerapan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, dengan begitu konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terjaga. Tahapan perencanaan Perangkat Daerah (PD) terdiri dari tahapan perencanaan lima tahunan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan tahapan perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja). Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja wajib dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan Tahun 2024 mendukung misi Kabupaten Tabanan yaitu, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang, dan ramah lingkungan, yang kemudian disesuaikan dengan tupoksi masing-masing.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang didalamnya memuat target kinerja, program dan kegiatan sebagai pendukung dalam pencapaian visi dan misi serta target yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan dan keselarasan antara RPJPN, RPJMD Propinsi dan RKPD dan Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga terwujud konsistensi dokumen dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengandokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi RenjaPerangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra



Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan



baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun



strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Sasaran Strategis Terwujudnya manajemen konflik yang efektif didukung oleh kegiatan dengan indikator Kinerja Utama Prosentase terkendalinya potensi konflik di wilayah Kabupaten Tabanan dengan target 100 % (Kasus) dan realisasi 100 % (Kasus)
2. Meningkatnya Idialisme terhadap nilai - nilai dasar wawasan kebangsaan dengan indikator Kinerja Utama Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Tabanan dengan target 220 Orang dan realisasi 100 % (220 Orang)
3. Meningkatnya Pendidikan politik masyarakat dengan indikator Indek rasa aman di wilayah Kabupaten Tabanan dengan target 78 % dan realisasi 100 % (78 %)
4. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kesbang didukung oleh kegiatan dengan indikator Kinerja Utama Nilai LKJIP dengan target B dan realisasi B.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tertuang kedalam Tabel 2.1 berikut.



Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Capaian Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	Terwujudnya manajemen konflik yang efektif	Persentase terkendalinya potensi konflik di wilayah Kab. Tabanan.	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya idealisme terhadap nilai - nilai dasar wawasan kebangsaan	Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan)	220 Orang	100 %	100 %
3	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	Indek rasa aman	78 %	78 %	100 %
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kesbang	Nilai LKJiP	B	B	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabanan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang mana di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabanan. Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam menganalisis keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan dilakukan dengan dua cara. Hasil capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan ditentukan oleh hasil kegiatan itu sendiri. Bagi sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tabanan yang hanya didukung oleh beberapa sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerja



sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan ditentukan oleh rata-rata hasil kegiatan seluruhnya.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan dari tahun 2022 sampai dengan 2023 secara menyeluruh terjadi peningkatan di masing-masing kegiatan. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemantauan terhadap stabilitas perekonomian serta sosial budaya daerah;
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan partai politik dalam aktivitas politik/demokrasi;

Adapun pencapaian kinerja diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Terwujudnya manajemen konflik yang efektif

Strategi untuk mencapai sasaran terwujudnya manajemen konflik yang efektif yaitu dengan indikator kinerja persentase terkendalinya potensi konflik diwilayah Kabupaten Tabanan dengan meningkatkan kapasitas aparatur dan jejaring kominda/komintel.

Sasaran tersebut diperlukan program kegiatan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator terkendalinya potensi konflik di wilayah Kabupaten Tabanan. Untuk mendukung program Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan : Pemantauan Pengendalian Pengamanan Daerah (plapon anggaran sebesar Rp. 1.366.245.300) Pengawasan Orang Asing (plafond sebesar Rp. 0). serta kegiatan Operasi Kominda/Komintel (plafond sebesar Rp. 189.987.300,00).

2. Meningkatnya pembinaan politik masyarakat;



Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pembinaan politik masyarakat yaitu dengan indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu dengan membangun ruang komunikasi politik yang produktif.

Sasaran tersebut bisa dicapai dengan Program Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat dengan indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya dalam pemilu dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Parpol (plafond sebesar Rp. 16.589.000,00). Kegiatan fasilitasi ini menysasar 6 parpol yang mendapatkan bantuan keuangan sesuai jumlah suara yang diperoleh. Parpol terseut terdiri dari PDI-P, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Nasdem dengan total bantuan keuangan sebesar Rp. 764.533.600,00. Kegiatan lainnya yaitu, Kegiatan Dialog Pembauran Kebangsaan (plafond sebesar Rp. 75.940.000,00) Kegiatan ini melaksanakan dialog kepada 350 orang pelajar di Kabupaten Tabanan pemahaman Pancasila, wawasan kebangsaan, tentang narkoba dan kenakalan remaja. dan Kegiatan Pembinaan Ormas/LSM(Plafond sebesar Rp. 32.092.300,00) kegiatan ini menysasar 115 Ormas/LSM yang ada dikabupaten Tabanan, Pembinaan dan sosialisasi tentang regulasi Keormasan.

3. Meningkatnya Idialisme terhadap nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan

Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya idialisme terhadap nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan dengan indikator
Persentase generasi muda yang



mendapatkan pembinaan wasbang dengan mengintensifkan pembinaan dan pendampingan terhadap pengembangan nilai nilai dasar wasbang.

Sasaran tersebut bisa dicapai dengan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator persentase generasi muda yang mendapatkan pembinaan wasbang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan : Implementasi Nilai Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara (plafond anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00). Kegiatan ini menyasar generasi muda yang ada di kabupaten Tabanan untuk dijadikan kader-kader generasi muda yang bisa meningkatkan konsistensi empat Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, dapat dilihat dari tabel berikut :



**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Tabanan**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase terkendalinya potensi konflik di wil. Kab. Tabanan		Terkendalinya keamanan daerah, persentase situasi keamanan daerah yg kondusif dan terkendali, jml tokoh agama/penganut kepercayaan terbina dlm mengelola potensi konflik adat/sosial	110 or	220 or	225 or	225 or	94 %	-	100 %	100 %	
2	Prosentase terkendalinya potensi konflik di wil. Kab. Tabanan		Jml. LSM dan karang taruna yg terpapar nilai-nilai wasbang dan bela negara	110 or	220 or	220 or	220 or	94 %	-	100 %	100%	
3	Persentase partisipasi masyarakat		Jml Parpol yg tertib mempertanggungjawabkan bantuan keu, jml siswa yg		78 %	78 %	85 %	97 %	-	74 %	74	



	dalam penggunaan hak pilih dlm Pemilu		mendapatkan bimteknipemantapan nilai-nilai wasbang, jml msy yg mendapatkan pendidikan politik, jml kec. Yg terpantau, terkendali dan terkoordinir									
--	---------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Dibidang pemuda

Masa depan bangsa terletak di tangan generasi muda/pemuda. Alih peran dari generasi ke generasi senantiasa menempatkan posisi pemuda sebagai pelaku utama agen perubahan yang diharapkan mampu berkontribusi dalam percepatan terwujudnya kedaulatan identitas/karakter. Seiring globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang gencar melanda dunia, maka berbagai permasalahan muncul terkait dengan kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Sejalan dengan hal tersebut permasalahan dan isu strategis dibidang pemuda di Kabupaten Tabanan antara lain :

- a. Semakin menurunnya semangat nasionalisme sehingga mengaburkan karakter dan jati diri serta menurunkan moral pemuda dan cenderung memicu sikap individualisme yang berujung pada munculnya konflik sosial;
- b. Belum optimalnya pendidikan kepemudaan dalam membentuk kepribadian pemuda yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup;
- c. Pemuda sebagai benteng pertahanan ideologi, adat dan budaya belum memiliki peran yang cukup;

2. Dibidang agama dan budaya

Agama dan budaya dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang, dapat dibedakan namun tak dapat dipisahkan. Kehidupan agama dan budaya saling menguatkan peran dalam membentuk manusia yang berakhlak mulia, beretika



serta sujud taqwa kepada sang pencipta semesta beserta isinya. Dinamika kehidupan beragama dan berbudaya senantiasa mewarnai interaksi sosial masyarakat Tabanan dalam susunan masyarakat yang cukup heterogen. Kehidupan beragama serta interaksi sosial di bidang budaya sampai saat ini berlangsung sangat baik. Kondisi ini belumlah cukup menjadi jaminan kelanggengan situasi dimasa mendatang, karena masalah agama dan budaya sangat rentan menimbulkan konflik. Sejalan dengan hal tersebut permasalahan dan isu strategis dibidang agama dan budaya di Kabupaten Tabanan antara lain

:

- a. Terjadi kasus pencurian pratima dan upaya-upaya provokasi melalui pelecehan simbol-simbol agama yang menyebabkan keresahan umat beragama;
- b. Menurunnya minat generasi muda untuk memelihara dan mengembangkan seni dan budaya local;
- c. Belum terpola dan terprogram upaya-upaya pelestarian peninggalan budaya, baik berwujud benda/bangunan maupun berupa nilai-nilai/kearifan lokal, bahasa, dan seni.

3. Dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti telah banyak membantu mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan ini tidak dipungkiri pula telah membawa dampak negatif terhadap eksistensi budaya lokal yang makin tergerus. Permasalahan dan isu strategis dibidang ini adalah ancaman terhadap budaya lokal akibat perkembangan teknologi.

4. Dibidang politik



Permasalahan dan isu strategis dibidang ini adalah :

- a. Banyaknya ormas/LSM baru yang belum terdaftar secara legal sehingga menyebabkan sulitnya dilakukan pembinaan dan berdampak pada timbulnya potensi pelanggaran oleh anggotanya;
- b. Masih terjadinya konflik bernuansakan adat terkait sengketa lahan maupun tapal batas desa adat, yang apabila tidak diantisipasi dengan cepat, maka dikhawatirkan dapat mengganggu kedamaian di masyarakat;
- c. Meningkatnya ketidakpedulian antar masyarakat ditingkat terkecil yang menyebabkan tidak terdeteksinya potensi gerakan-gerakan separatis dan potensi kejahatan local;
- d. Konflik sosial.

Dari uraian di atas maka Program-program dan kegiatan-kegiatan diseleksi berdasarkan skala prioritas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja OPD tahun 2024.

Fokus Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 menitik beratkan pada sector pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tema yang diusung adalah

“PEMULIHAN EKONOMI MENUJU TABANAN ERA BARU



AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)”

Tema tersebut memberikan indikasi kuat bahwa di Tahun 2024, Kabupaten Tabanan akan melakukan proses perubahan secara merata mencakup seluruh sistem dalam sector pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, pariwisata, infrastruktur dan SDM. Melalui tema tersebut juga, program prioritas tahun 2024 akan diarahkan kepada :

KABUPATEN TABANAN

- Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Produk Pertanian yang berdaya saing;
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan tahun 2019 merupakan rencana tahunan ketiga pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan ahiode tahun 2016-2021. Sebagai tindak lanjut dari Visi Bupati Tabanan, yaitu terwujudnya Tabanan yang Serasi, makaditetapkanlah misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang peka dan tanggap mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang tangguh serta pelestarian semangat wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Misi 3 : Mewujudkan harmonisasi lembaga-lembaga kemasyarakatan dan politik sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Misi 4 : Mewujudkan perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Keempat misi diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuandan sasaran strategis dalam kerangka lima tahunan. Atas dasar identifikasi permasalahan dan analisis berbagai isu strategis daerah dalam tahun terakhir, maka ditetapkanlah rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2019.



Dalam rangka implementasi visi Presiden Republik Indonesia yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, maka Kementerian Dalam Negeri merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

VISI Kemedagri :

Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif dengan didukung sumberdaya aparatur yang professional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan

MISI sebagai berikut :

1. Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memantapkan system politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keselarasan hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan secara kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya, serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Beberapa catatan penting pada uraian Misi Kemendagri yang menjadi acuan dalam penyusunan renstra Badan Kesbangpol kabupaten Tabanan sehingga keduanya memiliki keterkaitan, yaitu :



1. Mewujudkan sistem politik yang demokratis. Misi ini sejalan dengan misi Badan Kesbangpol kabupaten Tabanan (renstra 2021 - 2026) yaitu pada misi 3 : terwujudnya harmonisasi kelembagaan/organisasi kemasyarakatan dan terjaganya stabilitas di bidang politik;
2. NKRI sebagai wadah dalam membingkai keberdayaan masyarakat yang partisipatif Misi ini sejalan dengan misi Badan Kesbangpol kabupaten Tabanan (renstra 2021 - 2026) yaitu pada misi 1 : terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki sikap dan pandangan ideologi serta wawasan kebangsaan serta dengan misi 2 : memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekonomi,;

Kegiatan pendidikan politik pada kurun waktu 5 tahun anggaran(renstra periode 2011-2015) tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-2021 Hal ini tidak sejalan dengan visi dan misi Renstra Kemendagri yang secara konsisten menyelenggarakan pembinaan di bidang politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing- masing misi. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap



sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator harus Spesific, Measurable Achievable dan Relevant. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memeperkuat kapasitas pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan potensi politik.
2. Memeperkokoh rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air dalam keragaman sosial dan budaya.
3. Mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan dinamis serta menjalin kemitraan yang bersinergi dengan lintas organisasi/kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang akuntable, transparan dan partisipatif.

Politik Kabupaten Tabanan dalam menerapkan Visi dan Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang peka dan Tanggap mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
2. Mewujudkan ketahanan sosial/budaya yang tangguh serta pelestarian semangat wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan harmonisasi lembaga – lembaga kemasyarakatan dan politik sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan di bidang bangsa politik.



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan penerapan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rencana program dan kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2020 disampaikan pada Tabel 3.1 – Tabel 3.8.

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
(Program I)

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Terwujudnya manajemen konflik yang efektif	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	Persentase terkendalinya potensi konflik di wilayah Kabupaten Tabanan
	Pemantauan dan pengendalian pengamanan daerah	Terkendalinya Keamanan daerah.
	Pengawasan Orang Asing	Persentase terjaganya situasi keamanan daerah yang kondusif dan terkendali.
	Operasi Kominda/Komintel	Persentase terjaganya situasi keamanan daerah yang kondusif dan terkendali.



Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Bina Solideritas kerukunan antar tokoh lintas agama/penganut kepercayaan dan tokoh masyarakat	Jumlah tokoh agama/penganut kepercayaan terbina dalam mengelola potensi konflik adat/sosial

Pada Tabel 3.1, sasaran “Terwujudnya manajemen konflik yang efektif” dilaksanakan melalui satu program. Program yang pertama yaitu Program Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.. Program ini terdiri empat kegiatan yaitu:

- 1. Pemantauan dan pengendalian pengamanan daerah
- 2. Pengawasan Orang Asing
- 3. Operasi Kominda/ Komintel.
- 4. Bina Solideritas kerukunan antar tokoh lintas agama/penganut kepercayaan dan tokoh masyarakat.

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
(Program II)

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Meningkatnya idealisme terhadap nilai - nilai dasar wawasan kebangsaan.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah generasi muda yang mendapatkan pembinaan wasbang.



Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Jumlah ormas, LSM dan Karang Taruna yang terpapar nilai – nilai wasbang dan bela negara.

Pada Tabel 3.2 sasaran “Meningkatnya idealisme terhadap nilai – nilai dasar wawasan kebangsaan.” Program ini terdiri atas dua kegiatan yaitu : Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
(Program III)

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Meningkatnya pembinaan politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah parpol yang tertib mempertanggungjawabkan bantuan keuangan



Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah siswa yang mendapat bimtek pemantapan nilai – nilai wasbang
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terbinanya Ormas/LSM

Pada Tabel 3.3 sasaran “Meningkatnya pembinaan politik masyarakat” terdiri atas Tujuh kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi



Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pendidikan politik masyarakat

- 2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Tabel 3.5 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
(Program IV)

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
	Administrasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
	Administrasi Keuangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam



Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
		kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Sakip tersedia

Pada Tabel 3.5 sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ” dilaksanakan melalui tiga program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. sasaran ini terdiri atas empat kegiatan yaitu :

1. Penunjang Administrasi Perkantoran, merupakan tugas pokok di Sekretariat dimana bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana, merupakan tugas pokok di Sekretariat dimana bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip, merupakan tugas pokok di Sekretariat dimana bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan SAKIP;
4. Pendataan Data Aset, merupakan tugas pokok di Sekretariat dimana bertujuan untuk mengelola aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3.4. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Disasaran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail Rencana kerja dan pendanaan yang direncanakan di tahun 2024 disampaikan pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			2024			
			target	Dalam Juta (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran dan fungsi OPD	100 %	100 %	5.055.508.420	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	100 %	214.285.350	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	100 %	4.196.841.420	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	100 %	5.000.000	KESBANGPOL	Kab. Tabanan



RENJA 2025 *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	100 %	55.000.000	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	100 %	313.607.800	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	100 %	270.773.850	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah generasi Muda yang mendapatkan pembinaan wasbang	80 %	80%	2.100.000.000	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000.000	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	500 Orang	500 Orang	500.000.000	KESBANGPOL	Kab. Tabanan



	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	100.000.000	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu	80 %	80 %	42.110.018.400	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	350 Orang	350 Orang	150.000.000	KESBANGPOL	Kab. Tabanan



	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	374.857 Orang	374.857 Orang	41.960.018.400	KESBANGPOL	Kab. Tabanan



PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Ormas	80 %	80 %	250.000.000,00	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase partisipasi masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi	100 %	100 %	954.491.000,00	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	954.491.000,00	KESBANGPOL	Kab. Tabanan



PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase terkendalinya potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	85 %	85 %	1.000.000.000,00	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	KESBANGPOL	Kab. Tabanan



Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	50 Orang	700.000.000,00	KESBANGPOL	Kab. Tabanan
--	--	----------	----------	----------------	------------	-----------------



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Disasaran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail Rencana kerja dan pendanaan yang direncanakan di tahun 2024 disampaikan pada Tabel 4.1.



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaraan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								51.470.017.820			57.167.400.000		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.055.508.420			5.301.500.000		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,000,000			5.200.000		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administراس i Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	100 persen	4 Dokumen	80 A	3.000.000	Hasil Kerjasa ma Daerah		Persentase Administراس i Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	3.100.000
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administراس i Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	100 persen	4 Laporan	80 A	2,000,000	Hasil Kerjas ama Daerah		Persentase Administراس i Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	2.100.000
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.196.841.420			4.406.600.000		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administراس i Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	100 persen	34 Orang/ bul	100 A	4.189.341.420	Sisa lebih perhitu ngan anggara n tahun sebelu mnya, dau tambah an		Persentase Administراس i Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	4.398.800.000



RENJA 2025 *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

														dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja				
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	100 persen	12 Dokumen	100 A	5,000,000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	5,200,000
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	100 persen	12 Laporan	100 A	2.500.000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	2.600.000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							214.285.350						224.800.000



RENJA 2025 *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan ,Delod Peken	100 persen	10 Paket	100 A	1.000.000	Hasil Kerjas ama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungi PD	100 persen	1.000.000
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan ,Delod Peken	100 persen	10 Paket	100 A	2.017.150	Hasil Kerjas ama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungi PD	100 persen	2.100.000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kator Yang Disediakan yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan ,Delod Peken	100 persen	10 Paket	100 A	30.268.200	Hasil Kerjas ama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan FungsI PD	100 persen	31.700.000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan ,Delod Peken	100 persen	15 Paket	100 A	6.000.000	Hasil Kerjas ama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungi PD	100 persen	6.300.000
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Mat erial	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan ,Delod Peken	100 persen	12 Paket	100 A	15.000.000	Hasil Kerjas ama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungi PD	100 persen	15.700.000

**RENJA 2025** *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	100 persen	3 Laporan	100 A	150.000.000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	157.500.000
8	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	100 persen	12 Dokumen	100 A	10.000.000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	10.500.000
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								55,000,000				57,700,000	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang menunjang kelancaran Tugas PD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Administrasi Perkantoran yang menunjang kelancaran Tugas PD	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	100 persen	10 Unit	100 persen	55,000,000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang menunjang kelancaran Tugas PD	100 persen	57.700.000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								313,607,800				329.200.000	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhi nya jasa penunjang kantor	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	100 persen	12 Laporan	100 persen	5,000,000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	5,200,000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Terpenuhi nya jasa penunjang kantor	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	100 persen	12 Laporan	100 persen	24,600,000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	25,800,000



8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhi nya jasa penunja ng kantor	Kab. Tabanan ,Tabanan ,Delod Peken	100 persen	12 Laporan	100 persen	284,007,800	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	298.200.000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								270.773.850				278.000.000	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Persentase Administ rasi Perkanto ra n yang Menduku ng Kelancar an Tugas dan Fungsi PD	Kab. Tabanan ,Tabanan ,Delod Peken	100 persen	7 Unit	100 persen	44.773.850	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	47.000.000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Administ ra si Perkanto ra n yang Menduku ng Kelancar an Tugas dan Fungsi PD	Kab. Tabanan ,Tabanan ,Delod Peken	100 persen	4 Unit	100 persen	26.000.000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	21.000.000



RENJA 2025 *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Administrasi	Kab. Tabanan, Tabanan	100 persen	1 Unit	100	200.000.000	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), hasil kerja sama daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	210.000.000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								2.100.000.000				2.205.000.000	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								2.100.000.000				2.205.000.000	
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengerti dan memahami nilai- nilai kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Meningkatnya Idealisme Masyarakat Terhadap Nilai- Nilai Kebangsaan	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	80 persen	12 Dokumen	100 persen	1.500.000.000	Hasil Kerjasama Daerah		Prosentase masyarakat yang mengerti dan memahami nilai- nilai kebangsaan	80 persen	1.575.000.000
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Prosentase masyarakat yang mengerti dan memahami nilai- nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Meningkatnya Idealisme Masyarakat Terhadap	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	80 persen	500 Orang	100 persen	500,000,000	Hasil Kerjasama Daerah		Prosentase masyarakat yang mengerti dan memahami nilai- nilai kebangsaan	80 persen	525.000.000



RENJA 2025 *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

					Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kebangsaan	Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	pNilai- Nilai Kebangsaan										
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengerti dan memahami nilai- nilai kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkat nya Idealisme Masyarakat Terhadap Nilai- Nilai Kebangsaan	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	80 persen	50 Orang	100 persen	100,000,000	Hasil Kerjasama Daerah	Prosentase masyarakat yang mengerti dan memahami nilai- nilai kebangsaan	80 persen	105,000,000	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								42.110.018.400					
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								42.110.018.400					
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	Persentase Masyarakat Yang mendapatkan pendidikan politik	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	80 persen	350 Orang	100 persen	150.000.000	Hasil Kerjasama Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu	80 persen	157.500.000	



RENJA 2025 *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

					dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Masyarakat Yang mendapatkan pendidikan politik	Kab. Tabanan , Delod Peken	80 persen	374.857 Orang	100 persen	41.960.018.400	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHT B), Hasil Kerja Sama Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu	80 persen	47.188.700.000	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							250.000.000				262.500.000		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							250.000.000				262.500.000		



RENJA 2025 *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Masyarakat dalam Pemberdayaan Ormas	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	80 persen	50 Orang	100 persen	100,000,000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Ormas	80 persen	105,000,000
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran n Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Masyarakat dalam Pemberdayaan Ormas	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	80 persen	50 Orang	100 persen	150,000,000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Ormas	80 persen	157.500.000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								954.491.000				1.002.200.000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								954.491.000				1.002.200.000	



RENJA 2025 *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Masyarakat Yang memahami Ketahanan Ekonomi	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	100 persen	100 Orang	100 persen	954.491.000	Hasil Kerjasama Daerah		Persentase partisipasi masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi	100 persen	1.002.200.000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								1.000.000.000				1.050.000.000	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								1.000.000.000				1.050.000.000	
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Prosentase terkendalnya potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Tabanan	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	85 persen	12 Dokumen	100 persen	50,000,000	Hasil Kerjasama Daerah		Prosentase terkendalnya potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	85 persen	52.500.000



RENJA 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

					Penanganan Konflik di Daerah		Daerah yang Disusu n										
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prosentase terkendalnya potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau n Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentas e keamana n dan kenyama nan lingkunga n di Kabupate n Tabanan	Kab. Tabanan ,Tabanan , Delod Peken	85 persen	50 Orang	100 persen	250.000.000	Hasil Kerjas ama Daerah	Prosentase terkendalin ya potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	85 persen	262.500.000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi diBidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Prosentase terkendalnya potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasidi Bidang Kewaspad aan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau an Orang Asing,	Persentas e keamana n dan kenyaman an lingkunga n di Kabupaten Tabanan	Kab. Tabanan, Tabanan , Delod Peken	85 persen	50 Orang	100 persen	700,000,000	Hasil Kerja sama Daera h	Prosentase terkendalnya potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	85 persen	735.000.000



RENJA 2025 *esatuan Bangsa dan Politik*

					Asing, Kewaspadaa n Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n,serta Penanganan Konflik di Daerah		Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspad aan Perbatasa n antar Negara, Fasilitasi Kelembag aan Bidang Kewaspad aan, serta Penangan an Konflikdi Daerah											
					TOTAL							51.470.017.820						57.167.400.000

BAB V
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan Tahun 2024. Dalam Renja tersebut diuraikan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan di tahun 2024 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 4 Juni 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran



Drs. PUTU DIAN SETIAWAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197310261993021003

